



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MARDI**
2. Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **439373**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.057.000.000**

1. Tanah Seluas 3019 m2 di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 3446 m2 di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/48 m2 di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/148 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 172 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
6. Tanah Seluas 177 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000
7. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000
8. Tanah Seluas 2174 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 262.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI  
Rp. 13.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI  
Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.401.437.330

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.776.337.330

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.776.337.330

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.